
Penerapan Salah Kaprah Ungkapan “Jer Basuki Mawa Beya”

The Agnes Angelita Setiadi
Fakultas Psikologi, Program Studi Magister Psikologi Sains
Universitas Surabaya
theagnesangelita@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan bentuk republik dan menganut sistem demokrasi, dimana pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan sistem yang sudah ditentukan sedemikian rupa, ada berbagai jabatan kepemimpinan yang dapat ditempati oleh perwakilan rakyat, mulai dari tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Banyaknya kesempatan yang tersedia untuk menduduki posisi kepemimpinan membuat persaingan antar individu atau kelompok golongan tertentu menjadi sangat ketat, dan tak jarang muncul usaha-usaha negatif yang juga dilakukan demi mendapatkan kemenangan, seperti misalnya politik uang dan korupsi. Dengan menggunakan metode review literature, peneliti menganalisis fenomena ini dengan falsafah kebudayaan Jawa yang luhur: “Jer Basuki Mawa Beya” dan teori motivasi. Didapatkan hasil bahwa keinginan berkuasa yang kebablasan dan banyaknya orang yang melakukan dapat menghasilkan motivasi yang keliru bagi seorang calon pemimpin.

Kata kunci: *Jer Basuki Mawa Beya*, korupsi, motivasi, politik uang

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan bentuk republik dan menganut sistem demokrasi, dimana pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menjalankan prinsip ini, bangsa Indonesia terus memperbaiki diri guna mencapai tujuan menjadi negara yang mensejahterakan seluruh rakyatnya dari berbagai kalangan dan dengan bermacam-macam kepentingan. Ditambah lagi dalam satu kesatuan negara Indonesia ini, ada ratusan ribu penduduk dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk menyatukan beragam isi kepala dengan latar belakang yang berbeda-beda menjadi satu tujuan. Namun tentu saja suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pemimpin. Dengan sistem yang sudah ditentukan sedemikian rupa,

ada berbagai jabatan kepemimpinan yang dapat ditempati oleh salah seorang rakyat, mulai dari tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Namun proses demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia belum menunjukkan dampak yang diharapkan, seperti adanya partisipasi politik yang tinggi, tersampainya aspirasi dan kebutuhan rakyat dengan baik, dan munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas yang mungkin selama ini tidak terdeteksi. Proses demokrasi juga memiliki sisi gelap dan salah satu contohnya adalah politik uang. Menurut Irawan (2015), politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Secara spesifik, tujuan politik uang yang biasanya dipraktekkan di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu untuk membeli kursi (biasanya di lembaga perwakilan rakyat), untuk menjamin kekebalan terhadap hukum, dan untuk membeli suara rakyat (Duadji dalam Ramadhani, 2018). Politik uang rupanya sudah menjadi hal yang sulit untuk dimusnahkan, hal ini terbukti dari sepanjang pemilu kepala daerah pada tahun 2017-2018 terdapat 35 kasus politik uang yang terjadi di berbagai daerah (Adithia, 2018). Padahal larangan praktek politik uang sudah tercantum pada undang-undang khusus pemilu.

Kasus politik uang yang memang mayoritas terjadi pada saat pemilu, mungkin memang bisa diprediksi hanya terjadi pada saat pemilu, dan juga akan berhenti setelah pemilu selesai. Namun permasalahan tidak lantas berhenti. Orang-orang yang terpilih untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan memiliki kebutuhan untuk mengembalikan “modal” yang sudah dikeluarkan semasa kampanye. Akhirnya tindakan korupsi terjadi dimana-mana. Korupsi menurut Pryscillia (2014) adalah:

- a) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya,
- b) Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Selama tahun 2018 saja ada 4 sosok pemimpin di Indonesia yang diberitakan terjerat kasus korupsi, yaitu salah satu mantan ketua DPR (Jegho, 2018); mantan wakil ketua DPR, mantan gubernur Jambi, dan mantan menteri sosial (BBC

News, 2018). Namun jika ingin lebih detail, sebenarnya tidak hanya 4 kasus ini saja yang terjadi. Banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang juga tidak diberitakan di media, dan yang lebih memprihatinkan adalah pelakunya berasal dari para wakil-wakil rakyat sendiri. Sebuah statistik menunjukkan angka kasus korupsi meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 19 kasus pada tahun 2015, 23 kasus pada tahun 2016, sedikit menurun menjadi 20 kasus pada tahun 2017, dan kemudian melonjak drastis menjadi 61 kasus pada tahun 2018 (Jegho, 2018).

Korupsi dan politik uang, seakan-akan sudah menjadi “budaya” di Indonesia. Politik uang memberikan kesan bahwa seakan-akan kedudukan posisi-posisi penting dari negara kita bisa diduduki oleh siapa saja yang punya uang, bukan mereka yang memang punya hati dan kualitas mumpuni. Dilanjutkan dengan korupsi yang bisa dengan mudahnya dilakukan dan dapat membuat kaya dalam sekejap, akhirnya membelokkan beban mulia yang seharusnya disandang oleh siapa saja yang ingin menjadi pelayan publik. Namun seberapapun parahnya praktek-praktek kecurangan ini, kita tetap perlu berusaha untuk memberantasnya.

Sebagai negara yang kental dengan kebudayaan, seharusnya ada nilai-nilai moral yang berasal dari kearifan lokal Indonesia, yang apabila terus diimplementasikan akan membawa kebaikan. Dari sekian banyak suku dan kebudayaan di Indonesia, suku Jawa menjadi yang terbanyak dalam hal jumlah (Siswanto, 2010). Tidak hanya itu, apabila membahas kepemimpinan, awal mula tampuk kepemimpinan Indonesia juga dipegang oleh seorang Jawa, yaitu presiden Ir. Soekarno. Dampaknya sedikit banyak, kepemimpinan di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa (Azhar, 2011). Bentuk pengaruh dari budaya Jawa dalam kepemimpinan Indonesia, salah satunya adalah adanya ungkapan “Jer Basuki Mawa Beya”.

Menurut filosofi Jawa, pemimpin seharusnya adalah seorang yang memegang prinsip “jer basuki mawa beya”, yakni memegang prinsip bahwa jika ingin mencapai sesuatu (keinginan, cita-cita dan kebahagiaan) maka harus ada harga yang dibayar (Suratno dan Astiyanto, 2009). Dalam konteks ini pemimpin seharusnya mau berkorban saat sudah memegang tampuk kepemimpinan, bukannya justru sibuk mencari cara untuk menguntungkan dirinya dengan

mengorbankan kepentingan umum. Namun sepertinya terjadi kesalahpahaman terhadap ungkapan “jer basuki mawa beya”. Kesalahpahaman inilah yang menyebabkan ada praktek politik uang dan korupsi. Kalau ingin mendapatkan kekuasaan maka ada biaya (uang mahar) yang harus dibayar. Selanjutnya, kalau ingin mendapatkan sesuatu seperti layanan yang cepat, perijinan dan administrasi yang lancar, maka harus ada biaya yang dibayarkan.

Sudah beberapa kali Indonesia memberlakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin, baik itu pusat maupun daerah. Pemilihan umum memiliki tujuan yang baik, agar seluruh aspirasi masyarakat bisa tersampaikan (demokratis). Berbeda dengan pada saat Indonesia berada pada orde lama dan orde baru, dimana pemimpin dipilih oleh golongan tertentu saja, yang justru memperbesar kemungkinan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun siapa sangka, ternyata sistem pemilihan yang sudah dibuka menjadi umum, tidak lantas dapat menghilangkan praktek-praktek korupsi dan politik uang. Menurut Susiatiningsih (2015) hal buruk dari pemilihan umum ini bisa terjadi karena motivasi calon pemimpin yang salah, yaitu untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya atau memperoleh kembali dana yang ia keluarkan untuk menarik simpati publik pada saat kampanye. Perlu disadari bahwa bukan sistemnya yang kurang baik, tetapi moralitas manusianya yang perlu diobati. Oleh sebab itu, penulis ingin menulis artikel ini untuk mengingatkan dan meluruskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan ungkapan “jer basuki mawa beya”, khususnya dalam konteks politik dan pemerintahan Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, yaitu salah satu metode penelitian yang mengutamakan penelusuran pustaka, seperti buku-buku dan jurnal tentang falsafah budaya Jawa dan pengimplementasian falsafah tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Peneliti juga menyoroti bahwa salah satu penyebab konsep salah kaprah tentang “jer basuki mawa beya” adalah adanya motivasi menjadi pemimpin atau penguasa

yang melenceng dari yang seharusnya, sehingga dalam penelitian ini juga diberikan analisis dari segi motivasi.

Pembahasan

“Jer Basuki Mawa Beya” berasal dari kata:

- “JER” = memang
- “BASUKI” = selamat berhasil, bahagia
- “MAWA” = biaya atau dana
- “BEYA” = biaya atau dana.

Sehingga artinya adalah setiap keinginan, cita-cita, dan kebahagiaan pasti membutuhkan biaya baik bentuknya berupa uang, tenaga, pikiran, atau pengorbanan lain (Suratno & Astiyanto, 2009). Dalam artikel ini, khususnya membahas mengenai bagaimana untuk mencapai suatu kedudukan, baik itu sebagai pemimpin maupun wakil rakyat, ada biaya yang harus dibayar atau pengorbanan yang harus dilakukan. Contohnya, apabila ada seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka dirinya harus sudah siap mengorbankan waktu bersama keluarga yang tentunya akan semakin berkurang, siap merelakan dirinya untuk lebih banyak memikirkan permasalahan satu desa daripada masalah pribadinya, dan bahkan siap jika sewaktu-waktu harus mengeluarkan sebagian uang pribadinya untuk membantu warganya yang sedang kesusahan. Apabila semua pemimpin dan wakil rakyat memiliki pemikiran dan perilaku seperti ini, tentu praktik korupsi dan politik uang sudah tidak ada lagi. Namun karena pada kenyataannya kedua hal ini masih banyak terjadi, maka tentunya ada suatu penyelewengan dari konsep yang ideal. Ada individu-individu atau kelompok yang menyalahgunakan konsep sesungguhnya dari “jer basuki mawa beya”. Berdasarkan sumber-sumber yang digunakan peneliti sebagai acuan review literature, maka penyebab penyalahgunaan yang terjadi bisa dibagi menjadi 2 hal yaitu keinginan untuk berkuasa yang kebablasan dan karena banyak yang melakukan.

Keinginan untuk berkuasa yang *kebablasan*

Setiap manusia pada dasarnya memang memiliki kebutuhan atau dorongan untuk menguasai lingkungannya. Menurut White dalam Petri & Govern (2004), dorongan ini disebut *competence motivation*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketika manusia bisa menguasai lingkungannya, maka ia akan memiliki perasaan bahwa dirinya adalah manusia yang efektif. Hal ini memberikan kepuasan tersendiri bagi diri manusia tersebut. Keinginan atau dorongan individu untuk dapat menguasai lingkungannya juga terimplementasi salah satunya melalui keinginan untuk memiliki kedudukan di posisi-posisi penting pemerintahan. Karena dengan cara ini, individu dapat memiliki kekuasaan atau dapat menguasai lingkungannya, baik dari lingkup yang kecil seperti kelurahan sampai lingkup negara. Keinginan tersebut adalah hal yang wajar, namun perlu disadari bahwa menduduki kursi kepemimpinan berarti juga memiliki porsi tanggung jawab yang lebih besar. Menguasai keadaan di rumah atau keluarga hanya akan berdampak pada sebagian kecil orang; menguasai negara, bertanggungjawab terhadap keuangan negara berdampak pada kesejahteraan satu negara. Sehingga dalam memenuhi dorongan manusiawi untuk menguasai sesuatu, tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab terhadap publik. Tanpa menyadari tanggung jawab yang diemban, seorang pejabat negara akan bisa dengan mudah menyalahgunakan amanah yang diberikan masyarakat, karena dorongan untuk menguasai akan mengendalikan seluruh tindakannya, termasuk apabila akhirnya terjerat kasus politik uang dan korupsi.

Untuk itulah individu yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat hendaknya memiliki regulasi diri yang baik. Regulasi diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengontrol dan mengarahkan tindakan yang dilakukan (Taylor, Peplau dan Sears, 2006) Manusia, pada dasarnya adalah makhluk yang dipenuhi oleh informasi, baik itu informasi eksternal (dari lingkungan sekitar, keluarga, orang-orang dekat) maupun dari internal (hasrat, cita-cita dan konsep dirinya sendiri). Seluruh informasi ini bergabung dan siap untuk diolah oleh individu tersebut, dan bagaimana cara mengolahnya pada akhirnya akan menentukan “hasil olahan” yang nampak pada tindakan nyata. Seseorang dengan regulasi diri yang baik dapat menentukan kapan dirinya harus

bertindak berdasarkan pengaruh lingkungan eksternal, dari hati nurani dirinya sendiri atau menggabungkan antara keduanya. Sebaliknya, para pelaku korupsi dan politik uang adalah mereka yang: 1) menjadi terlalu dikuasai oleh lingkungan sekitar yang menekan mereka untuk melakukan tindakan tersebut atau 2) mereka yang kalah oleh hasrat pribadi yang haus akan materi. Regulasi diri yang baik akan memperlengkapi seorang pemimpin atau wakil rakyat, sehingga walaupun berada di tengah-tengah lingkungan yang membuka kesempatan untuk berbuat kurang patut, mereka bisa memutuskan untuk melakukan tindakan yang benar.

Karena banyak yang melakukan

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya cenderung kolektif. Kebersamaan dan gotong royong juga adalah nilai kearifan lokal yang ada di kebudayaan Jawa (Adelina et al, 2018). Namun hal ini berlaku untuk hal yang baik dan juga hal yang buruk. Praktik politik uang dan korupsi sejatinya tidak serta merta marak terjadi sejak Indonesia pertama kali merdeka. Namun karena ada yang mengawali, akhirnya semakin lama semakin banyak pelakunya. Festinger, Pepitone, dan Newcomb (1952) dalam Myers (2010) menamai perilaku ini *deindividuation*, yaitu ketika seseorang kehilangan rasa individunya ketika berada dalam suatu “kelompok” sehingga menjadi sukarela untuk melakukan norma yang berlaku dalam kelompok, baik itu hal yang baik maupun buruk. Maraknya kasus korupsi dan politik uang di Indonesia seakan-akan telah menjadi “budaya” bagi mereka yang terjun dalam dunia politik dan pemerintahan. Lagipula apabila dilihat secara jangka pendek, tindakan korupsi dan politik uang bisa menguntungkan.

Seorang calon legislatif berpikir bahwa dengan membeli suara rakyat maka dirinya akan bisa mendapatkan kedudukan di DPRD; setelah menduduki suatu kedudukan maka ia berpikir bahwa dengan mengambil sedikit uang negara maka modal yang ia gunakan untuk membeli suara rakyat dapat kembali. Namun jangka panjangnya, tindakan korupsi dan politik uang memiliki efek seperti bola salju, semakin lama akan semakin besar dan sulit dikendalikan lajunya. Mungkin 1 pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi tidak akan terlalu berdampak terhadap keuangan negara, namun untuk menutupi tindakan tidak terpujinya, ia

juga harus mengajak kerjasama beberapa pihak dan juga harus dibayar. Satu orang akan mengajak kerjasama 4 orang, lalu 10 orang, dan sampailah pada hari-hari ini, dimana kasus korupsi dan politik uang sudah marak terjadi. Terbukti dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, bahwa kasus korupsi dan politik uang selalu melibatkan beberapa orang sekaligus atau jaringan tertentu. Individu-individu yang berada pada “kelompok” pelaku ini sudah kehilangan rasa individualnya dan hanya memedulikan norma kelompoknya, yaitu bertindak korup. Tentu akan sulit bagi orang-orang yang menolak melakukan korupsi apabila sekitarnya adalah pelaku, apalagi apabila posisi orang tersebut adalah bawahan.

Menghidupkan Falsafah “Jer Basuki Mawa Beya”

Kita patut bersyukur bahwa Indonesia adalah negara yang kental akan kebudayaan dan kebudayaan itu melahirkan falsafah-falsafah yang bisa dijadikan pedoman hidup. Ungkapan “jer basuki mawa beya” lahir dari nilai-nilai kebudayaan Jawa yang kental akan etika dan kebenaran, sehingga falsafah ini sangat tepat apabila dijadikan pedoman hidup khususnya bagi mereka yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Mereka adalah pelayan publik, sehingga “BASUKI” yang harus dicapai justru adalah pelayanan yang optimal terhadap masyarakat, kesejahteraan bersama, bukan malah sibuk menguntungkan diri sendiri. Untuk mencapai tujuan mulia yang seharusnya dijadikan pegangan oleh seluruh pelayan publik ini, dibutuhkan “BEYA” yang harus dibayar, yaitu berupa pengutamaan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi (Ferianda, 2017).

Kesimpulan Dan Saran

Setiap orang pasti memiliki dorongan untuk menguasai. Namun apabila tidak diperhatikan konteksnya dengan baik, dorongan-dorongan ini bisa menjadi motor penggerak seorang individu bergerak ke arah yang salah. Semakin berbahaya apabila individu ini adalah pemimpin dan wakil-wakil rakyat di negara kita yang demokratis ini. Individu yang tidak bisa melakukan regulasi diri bisa melakukan apa saja, mengorbankan apa saja, untuk mencapai tujuannya. Karakteristik bangsa Indonesia yang cenderung kolektif bisa memperparah hal ini, apabila norma kelompok yang berlaku mulai mengarah ke hal-hal yang kurang

baik. Karena banyak yang korupsi, maka seakan-akan hal tersebut menjadi halal untu dilakukan. Kembali mencermati, menjiwai dan melakukan ungkapan “JER BASUKI MAWA BEYA” yang berasal dari nilai-nilai kebudayaan lokal harapannya bisa menangkal dorongan-dorongan yang sudah mengarah ke arah yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adithia, F. B. (10 Juli 2018). *Susno Duadji: Politik Uang Bukan Pelanggaran Pemilu* retrieved 11 Desember 2018 from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/susno-duadji-politik-uang-bukan-pelanggaran-pemilu/full>
- Azhar, I.N. (2011). *Falsafah Kepemimpinan Bangsa dalam Paribasan Jawa (Aksioma Budaya yang mulai ditinggalkan)*. Konferensi Kongres Bahasa Jawa V, 1. n.p
- Budiyono., Feriandi.Y.A. (2017). *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa sebagai Sumber Pendidikan Karakter*. Prosiding SNBK, 1 (1): 92-103
- BBC News Indonesia. (24 Agustus 2018). *Jadi tersangka kasus korupsi, Idrus Marham mundur dari kabinet Jokowi* retrieved 11 Desember 2018 from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45296909>
- BBC News Indonesia. (6 Desember 2018). *Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan dicabut hak politik selama lima tahun* retrieved 11 Desember 2018 from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46464518>
- BBC News Indonesia. (2 November 2018). *Taufik Kurniawan, wakil ketua DPR, resmi ditahan atas tuduhan korupsi Rp3,6 miliar* retrieved 11 Desember 2018 from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46031122>
- Feriandi, Y. A. (2017). *Revitalisasi moral kewarganegaraan dalam ungkapan Jawa sebagai sumber pembentukan civic culture dan politic culture*. Journal Civics Vol. 14 No. 2: 176-182
- Irawan, Dedi. (2015). *Studi tentang politik uang (money politics) dalam pemilu legislatif tahun 2014 (Studi Kasus di keluarahan Sempaja Selatan)*. eJournal Ilmu Pemerintahan: 1725-1738

-
- Jegho, Leo. (6 November 2018). *Jokowi dan Korupsi di Indonesia, Adakah Membawa Perubahan?* Retrieved 15 November 2018 from <https://www.matamatapolitik.com/jokowi-dan-korupsi-di-indonesia-adakah-membawa-perubahan/>
- Myers, D.G. (2010). *Social Psychology 10th Edition*. New York: McGraw-Hill
- Petri, H.L., Govern, J. M. (2004). *Motivation Theory, Research, and Applications*. California: Vicki Knight
- Ramadhani, Yulaika. (10 Juli 2018). *Tiga Praktik Politik Uang dalam Pemilu Menurut Susno Duadji* retrieved 11 Desember 2018 from <https://tirto.id/tiga-praktik-politik-uang-dalam-pemilu-menurut-susno-duadji-cNRY>
- Siswanto, Dwi. (2010). *Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa terhadap Model Kepemimpinan*. Jurnal Filsafat, 20 (3): 197-216
- Suratno, P., Astiyanto, H. (2009). *Gusti Ora Sare 90 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*. Yogyakarta: Adiwacana
- Susiatiningsih, Hermini. (2015). *Kearifan Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung*. Forum Vol. 40 No. 2: 1-5
- Taylor, S.E., Peplau, L.A., Sears, D.O. (2006). *Social Psychology 12th Edition*. New Jersey: Pearson Education